

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah disiplin ilmu yang melibatkan sejumlah besar fakta tentang dunia. Tetapi seperti telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta ini hanya akan menjadi lebih bermakna dan relevan ketika tersedia suatu kerangka berpikir (teori) sebagai tempat bagi fakta-fakta tersebut untuk Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik) dideskripsikan, dianalisis dan bahkan memperhitungkan sesuatu yang akan terjadi ke depan. Dalam hubungan internasional aktivitas manusia di mana orang-orang dari lebih dari satu bangsa, secara individu dan dalam kelompok, berinteraksi.

Implementasinya pada hubungan yang terjalin antar Aktor berupa negara (*state*) maupun bukan negara (*non-state*) seperti Organisasi Internasional. Carr karenanya pernah menganalogikan fakta dengan karung/goni dan menulis, "*a fact is like a sack, it won't stand up till you've put something in it*" [fakta itu ibarat karung yang tidak akan tegak berdiri jika tidak diisi sesuatu di dalamnya] (Carr, 1961: 11, dalam Woods, 1996: 9).

Bull (1995: 181-182) mengemukakan bahwa teori hubungan internasional bisa dipahami sebagai sekumpulan proposisi-proposisi umum yang dikemukakan mengenai politik global/dunia (*world politics*). Proposisi mencakup proposisi-proposisi normatif, yang menyatakan konsiderasi-konsiderasi moral ataupun legal yang dapat diaplikasikan dan juga proposisi-proposisi positif yang mendefinisikan atau menjelaskan karakter aktualnya.

Teori hubungan internasional meliputi teori-teori komprehensif yang mendeskripsikan atau menentukan politik internasional secara keseluruhan, tetapi juga teori-teori parsial yang hirau dengan beberapa elemen politik internasional semisal perang atau damai, strategi atau diplomasi. Teori hubungan internasional juga meliputi teori tentang masyarakat internasional atau sistem internasional yang membahas

mengenai hubungan berbagai unit (negara-negara, bangsa-bangsa, kelompok-kelompok supranasional, transnasional dan subnasional) yang membentuk politik global/dunia Teori & Teori Hubungan Internasional (*world politics*), termasuk juga teori mengenai unit-unit itu sendiri.

Teori hubungan internasional meliputi juga teoriteori yang dikembangkan secara sadar untuk meniru metode ilmu-ilmu alam, yang artinya menolak apa saja yang tidak dapat dibuktikan secara logis, matematis atau tidak dapat diverifikasi secara ketat melalui prosedur-prosedur empiris; dan juga tentu saja teori-teori yang dikembangkan tanpa mengikuti persyaratan metodologis di atas. Menurut Bull, teori hubungan internasional juga mencakup teori-teori yang secara sengaja dibuat melalui simplifikasi realitas misalnya dengan elaborasi model-model deduksi, termasuk juga teori-teori yang dibentuk melalui proses generalisasi induktif. Termasuk juga di dalam teori hubungan internasional ialah teori-teori yang memang secara sengaja tidak bermaksud memberi masukan bagi implementasi kebijakan dan juga teori-teori yang memang dirancang berorientasi kebijakan (*policy-oriented atau praxeological*).

Hubungan Internasional adalah sebuah interaksi yang terjadi melintasi batas negara yang dilakukan oleh aktor tertentu sesuai dengan kepentingannya dan ada beberapa kebijakan yang berlaku dalam mengatur hubungan tersebut. Awalnya pembahasan dan aktor dalam menjalin hubungan menjalin suatu hubungan dengan negara lain cenderung *High Politic* dan tertutup. Hubungan Internasional adalah studi mengenai pola akis dan reaksi di antara negara-negara berdaulat yang diwakili oleh elit pemerintah (Coulombis dan Wolfe, 2004: 24).

Menurut McClellan dalam buku *The Dictionary of World Politics*, mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai studi tentang interaksi antar jenis-jenis kesatuan sosial tertentu, di mana di dalamnya terdapat studi tentang keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi tersebut. Baik yang dilakukan oleh negara ataupun non-negara. Hubungan Internasional mencakup pengkajian Politik Luar Negeri dan Politik Internasional dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia (Perwita dan Yani, 2005:4).

### **2.1.2 Diplomasi**

Diplomasi dapat diartikan dengan sederhana yaitu hubungan antar negara. Kata Diplomasi berasal dari istilah “Diploma” yang berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang berarti “Surat Kepercayaan”. Diplomasi adalah penyelenggaraan hubungan antara negara – negara yang berdaulat melalui diplomat untuk mempromosikan negosiasi internasional. Secara konvensional, diplomasi adalah usaha suatu negara dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dunia internasional (Geoff Berridge and Alan James, 2003, hal. 69-70). Menurut definisi The Chamber’s Twentieth Century Dictionary, diplomasi adalah seni berunding, khususnya tentang perjanjian diantara negara-negara.

Sementara menurut Oxford English Dictionary, diplomasi adalah sebuah manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar ataupun diplomat. Begitupun menurut Geoffrey McDermott yang mengatakan bahwa diplomasi adalah pertimbangan dalam hubungan internasional. Sementara Ellis Briggs mengatakan bahwa diplomasi adalah sebuah kegiatan urusan official dengan cara mengirim seseorang untuk mewakili pemerintahan.

Menurut Hans J. Morgenthau diplomasi memiliki empat tugas utama, yakni :

- 1) Diplomasi harus membentuk tujuan dalam rangka kekuatan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan tersebut. Maksudnya adalah diplomasi yang dijalankan suatu negara harus memiliki sasaran capaian, apakah diplomasi tersebut dijalankan guna mencapai kerjasama ekonomi, politik ataupun militer sehingga para aktor yang menjalankan praktek diplomasi dapat menyusun strategi guna mencapai sasaran tersebut.
- 2) Diplomasi juga harus mengadakan penilaian tujuan dan kekuatan dari negara-negara lain. Maksudnya adalah para diplomat dan juga duta besar, juga harus mengetahui bargaining position dari negara lain, hal ini masih berkaitan dengan strategi yang akan dijalankan guna mencapai kepentingan nasional negara.

- 3) Diplomasi harus menentukan dalam hal apa perbedaan-perbedaan yang ada pada tujuan-tujuan negara lain dapat cocok dengan tujuan negara sendiri. Hal ini menjadi penting guna mencapai win-win solution sebagai hasil akhir dari proses diplomasi itu sendiri.
- 4) Diplomasi harus menggunakan cara-cara yang pantas. Penggunaan caracara yang pantas dalam diplomasi tidak hanya akan memberikan dampak bagi hubungan kedua negara tetapi juga bagi harmonisasi perdamaian dunia. (Frisca Alexandra, Dadang Ilham K. Mujiono. 2019. Hal 3-19)

Pada dasarnya Diplomasi diartikan berbeda – beda menurut pemakaian nya antara lain sebagai berikut :

1. Diplomasi berartikan Politik Luar Negeri;
2. Diplomasi berartikan pandai bersilat lidah;
3. Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan anantara berbagai pihak termasuk negosiasi anantara wakil – wakill yang sudah di akui;
4. Diplomasi merupakan suatu seni dan praktek melakukan negosiasi antara perwalian kelompok atau negara, biasanya mengacu pada pelaksanaan hubungan internasional melalui perantara diplomat profesional, berkaitan dengan isu – isu perang, perdamaian, perdagaan, ekonomi, budaya, lingkungan, dan HAM.

Salah satu upaya dalam wujud diplomasi yaitu dengan soft power, sebagai sarana dalam berkomunikasi yang dilakukan aktor negara pada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dan kemajuan negaranya. Diplomasi dikatakan juga sebagai “Soft Power” dalam pengertian konsep kekuasaan (power) dapat digambarkan sebagai tingkat sumber daya, kemampuan, dan pengaruh dalam urusan internasional. Soft power yaitu kekuatan menarik orang lain dengan kekuatan kecerdasan emosional seperti membangun hubungan atau ikatan yang erat melalui karisma, komunikasi yang persuasif, daya tarik ideologi visioner, serta pengaruh budaya, sehingga membuat orang lain terpengaruh. (Jr, 2010)

Menurut Sir Earnest Satow dalam bukunya *Guide to Diplomatic Practice* mengatakan bahwa diplomasi adalah implementasi kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah dengan negara-negara yang berdaulat (Sir Eatnest Satow,1995). Selain itu pandangan ahli terkait diplomasi yaitu:

“Diplomasi Pada dasarnya adalah usaha untuk meyakinkan pihak lain atau negara lain untuk dapat memahami dan membenarkan pandangan kita dan jika mungkin mendukung pandangan kita itu, tanpa perlu menggunakan kekerasan (Hasyim Djalal; 1990). Kemudian Menurut KM Panikkar dalam bukunya yang berjudul *The Principle of Diplomacy*, maka diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional merupakan seni dalam mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain (SL.Roy,2001), yang dalam hal ini merupakan kepentingan nasional suatu negara di dalam dunia internasional,tetapi oleh Sebagian pandangan diplomasi lebih memfokuskan terhadap negosiasi-negosiasi perjanjian atau sebagai posisi tawar menawar dengan negara lain.

Diplomasi sangat erat dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dilakukan dengan cara damai,namun apabila cara damai tersebut gagal untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan,diplomasi menyetujui penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuannya (RW,Sterling;233). Sehingga dapat dikatakan bahwa perang juga merupakan salah satu fasilitas dalam diplomasi di dunia internasional. S.L.Roy,mengkaji beberapa hal penting secara definitive yang tertera terkait diplomasi. Menurutnya dari berbagai definisi ada beberapa hal tampak jelas,bahwa :

1. Unsur pokok diplomasi adalah negosiasi,
2. Negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara,
3. Tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga serta memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin dan dilaksanakan secara damai,pemeliharaan perdamaian dengan tanpa merusak kepentingan nasional merupakan tujuan utama diplomasi,
4. Teknik-teknik diplomasi yang sering dipakai untuk mempersiapkan perang

bukan untuk menghasilkan perdamaian,

5. Diplomasi berhubungan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara,
6. Diplomasi modern berhubungan erat dengan system negara,
7. Diplomasi tidak bisa dipisahkan dari perwakilan negara (S.L.Roy, 1995)

Tujuan diplomasi bagi setiap negara adalah pengamanan kepentingan nasional, kebebasan politik dan integritas territorial. Menurut Kautilya tujuan utama diplomasi adalah menjamin keuntungan maksimum negara sendiri, dan kepentingan terdepan tampaknya adalah pemeliharaan keamanan. Fungsi utama dari penerapan diplomasi adalah negosiasi dan ruang lingkup diplomasi adalah menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin beberapa kepentingan negara melalui negosiasi yang sukses, apabila negosiasi gagal perang merupakan bagian dari sarana diplomasi. Adapun tiga cara dasar dalam penerapan diplomasi suatu negara yaitu Kerjasama, persuaian dan pertentangan, sehingga dalam tahap diplomasi suatu negara menjalankan tiga pelaksanaan diplomasi tersebut.

Diplomasi cenderung diasosiasikan sebagai soft power dan penggunaan kekuatan militer dianggap sebagai hard power. Dalam *the advance learners dictionary of current English* dinyatakan bahwa “*diplomacy is skill in making arrangement cleverness in dealing with people so that they remain friendly and willing to help*”. Sedangkan Sir Ernest Satow, menjelaskan sebagai “*the application of tact and intelligence to the conduct of foreign relation between government and independent state*”. Dapat diartikan bahwa diplomasi adalah suatu keahlian dalam menentukan metode memenangkan kepentingan kita tanpa harus menimbulkan permusuhan.

### **2.1.3 Diplomasi Kemanusiaan**

Humanitarianisme adalah konsep yang menggambarkan paradigma, aspirasi, kosakata profesional dan tindakan yang menekankan pada kesetaraan derajat umat manusia terlepas dari perbedaan ras, gender, agama, kewarganegaraan, ideologi, dan latar belakang lainnya. (Roberto Belloni, 2007)

Dalam pengertian yang agak berbeda, humanitarianisme hirau dengan perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu dari ancaman serta pencegahan dari

penderitaan. Humanitarianisme meliputi norma, institusi informal, hukum, dan wacana yang mendorong tindakan nyata untuk menjamin kehidupan manusia. (Michael Barnett,2010)

Humanitarianisme oleh karena itu sangat erat kaitannya dengan standar moralitas yang diakui secara universal. Aspek normatif ini bukan semata-mata menyangkut pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia sebagai seorang individu, tetapi juga memberikan penekanan pada aksi nyata untuk memperjuangkannya.

Dalam perspektif akademis, hubungan internasional tidak bisa dilepaskan dari aspek etika. Lynn Miller membagi persoalan dunia menjadi dua; persoalan konvergen dan persoalan divergen. (Lynn Miller,2006)

Kewajiban moral dalam politik dunia juga memperoleh dukungan dari perpektif konstruktivisme. Konstruktivisme menampik kritik sebagian kalangan yang memandang konstruktivisme tidak memiliki komitmen etis selain komitmen terhadap pengetahuan. Komitmen moral konstruktivis tampak dari penekanannya pada politik norma, yaitu bagaimana norma dan prinsip-prinsip etis lainnya mempengaruhi tindakan dan membentuk identitas serta kepentingan aktor-aktor internasional. (Richard Price,2008)

Menurut konstruktivis, norma-norma internasional termasuk di dalamnya norma kemanusiaan mendorong aktor internasional untuk bertindak sesuai dengan norma itu bukan karena didorong oleh kalkulasi untung-rugi, tetapi karena tindakan itu pantas dilakukan. Inilah logika tindakan yang dinamakan dengan ‘logika kepantasan’ (*logic of appropriateness*), yaitu tindakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip etis yang dianggap baik. Begitu aktor internasional menerima norma dan menginternalisasikannya, maka norma itu akan dianggap ‘*taken for granted*’ yang pada gilirannya menuntun tindakan aktor itu secara otomatis. (Martha Finnemore and Kathryn Sikkink,1998)

#### **2.1.4 Krisis Kemanusiaan**

Krisis kemanusiaan merupakan sebuah situasi dengan penderitaan manusia yang berada pada tingkat tinggi, dasar-dasar kesejahteraan manusia yang berada dalam

bahaya, dan mencakup skala yang besar (Internews, 2014). Secara umum, terdapat tiga kategori penyebab krisis kemanusiaan. Pertama, faktor bencana alam yaitu adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan sebagainya sebagai penyebab krisis kemanusiaan. Contoh dari krisis kemanusiaan ini ialah banjir di Pakistan tahun 2010, tsunami di kawasan Asia pada tahun 2004 dan 2005, dan lain sebagainya. Faktor kedua ialah complex emergencies, yaitu adanya konflik yang memicu krisis kemanusiaan.

Contoh dari krisis kemanusiaan dalam kategori ini adalah genosida di Rwanda tahun 1994; dan sebagainya. Ketiga, adalah masalah krisis lainnya yakni menyangkut masalah kesehatan, industri dan finansial. Contohnya adalah Bhopal gas tragedy tahun 1984, krisis harga pangan yang melanda berbagai negara tahun 2008 dan sebagainya (Internews, 2014). Berdasarkan klasifikasi penyebab krisis kemanusiaan di atas, kasus krisis kemanusiaan etnis muslim Rohingya termasuk dalam kategori complex emergencies. Hal tersebut dikarenakan krisis kemanusiaan etnis muslim Rohingya merupakan tindakan diskriminatif terhadap etnis minoritas yang dilakukan oleh etnis mayoritas di Myanmar yakni etnis Burma atau Buddha. Konflik antara etnis muslim Rohingya dengan etnis Burma berujung pada kekalahan etnis muslim Rohingya, dan merujuk pada tindak kejahatan kemanusiaan serta genosida atau pembersihan etnis.

Krisis Kemanusiaan adalah suatu tragedi yang terus berulang, karena tidak belajar dari masa lalu (Jan Egeland, 2016). Jan Egeland, mantan sekretaris jenderal Dewan Norwegia untuk Perdana Menteri, mengatakan bahwa krisis kemanusiaan yang terjadi saat ini adalah akibat dari ketidakmampuan kita dalam mempelajari pengalaman dari masa lampau. Egeland percaya bahwa solusi dari mengatasi krisis kemanusiaan adalah memperkuat koordinasi dan dukungan internasional.

Menurut Elizabeth Ferris (2019) Krisis Kemanusiaan bukanlah sebuah kejadian yang datang secara tiba-tiba, namun merupakan akibat dari kebijakan dan praktik yang buruk. Elizabeth Ferris yang merupakan seorang ahli bencana dan kemanusiaan internasional, mengatakan bahwa krisis kemanusiaan yang terjadi sebenarnya bukanlah suatu fenomena yang terjadi tiba-tiba begitu saja melainkan karena adanya suatu kebijakan dan praktik yang buruk. Menurut Ferris, solusi untuk mengatasi krisis

kemanusiaan adalah dengan mengembangkan kebijakan yang lebih baik, termasuk pencegahan dan mitigasi bencana. Kristalina Georgieva (2020) mengatakan bahwa Krisis Kemanusiaan dapat diatasi dengan suatu kebijakan yang baik dan inovatif.

Menurut Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, Georgieva menekankan pentingnya investasi dalam pengembangan infrastruktur, termasuk dalam bidang pendidikan dan kesehatan, untuk mendorong kemajuan dan mengatasi krisis kemanusiaan. David Miliband (2021) Menurut Presiden dan CEO *Internasioal Rescue Committee*, mengatakan bahwa krisis kemanusiaan terus meningkat dan solusinya adalah melalui kerjasama internasional dan upaya preventif yang tepat. Miliband menekankan pentingnya pencegahan, perlindungan, dan dukungan internasional yang kuat untuk mengatasi krisis kemanusiaan secara efektif.

### **2.1.5 Konflik Etnis**

Asmore (2001) mendefinisikan konflik sebagai ketidak sesuaian tujuan, keyakinan, sikap dan/atau tingkah laku. Artinya, berdasarkan keyakinan suatu etnis yang dibangun berdasarkan budaya etnisnya memiliki tujuan etnis secara umum dan tujuan tersebut dicapai dengan rancangan sikap atau tingkah laku anggota etnis. Tujuan ini menjadi citacita yang harus dicapai, namun dalam kenyataannya tujuan tersebut tidak tercapai oleh karena berbagai faktor, bahkan bisa jadi budaya yang diyakininya juga terancam juga karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

Kesadaran semua anggotanya terhadap suatu kelompok etnis yang berlebihan dapat memicu munculnya faktor etnosentrisme (*ethnocentrism*) yang bisa jadi salah satu faktor pemicu konflik etnis. Etnosentrisme adalah sikap dasar yang menunjukkan keyakinan bahwa kelompok etnisnya merupakan etnis yang paling super dibandingkan dengan etnis lainnya. Etnis lainnya dipandang sebagai etnis yang lebih rendah dari etnisnya. Kebudayaan etnisnya dianggap sebagai kebudayaan yang paling utama atau paling sentral, yang lain adalah budaya pendukung, agamanya dipandang sebagai agama yang paling baik, tradisinya sebagai tradisi yang paling baik, pakaian adatnya dipandang sebagai yang paling baik, dll.

Sikap seperti ini, mencerminkan keberpihakan yang berlebihan terhadap

kelompok etnisnya yang dapat mengganggu kontak atau keguyuban antar etnik, bahkan dapat menimbulkan diskriminasi, buruksangka, kekerasan dan konflik antar etnis (Darity, 2005). Faktor-faktor yang dapat memicu konflik antar etnis dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu paradigma kultural dan paradigma struktural (Darity, 2005). Paradigma kultural memandang konflik etnis sebagai isu identitas sosial yang disebabkan oleh adanya ancaman terhadap budaya etnis. Ancaman ini bisa jadi dipicu oleh etnosentrisme sebagaimana diuraikan di atas, diskriminasi, buruksangka, dll.

Paradigma struktural memandang bahwa konflik etnis bukan merupakan isu identitas etnis, melainkan isu yang erat kaitannya dengan masalah ekonomi, masalah politik, termasuk masalah pemukiman. Konflik antar etnis yang bersifat struktural dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Perebutan sumberdaya yang langka, seperti perebutan kekuasaan, lapangan kerja, teritorial, ekonomi, pengakuan hak dalam artian yang luas, dll.
2. Modernisasi yang bertentangan dengan budaya etnis
3. Penambahan anggota etnis melalui mekanisme non kekerabatan (*non kinsip*).

Konflik Etnis pun selalu dikaitkan dengan masalah perebutan kekuasaan dan sumber daya yang terbatas di antara kelompok-kelompok etnis yang berbeda. Kemudian konflik etnis juga terjadi karena timbulnya ketidaksepakatan dan kurangnya tingkat kepercayaan antarkelompok etnis. (Ashutosh Varshney.2002) mendefinisikan terhadap suatu konflik etnis yaitu sering kali terjadi ketika kelompok-kelompok etnis tersebut merasa bahwa hak-hak mereka telah direnggut atau tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya maupun kekuasaan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

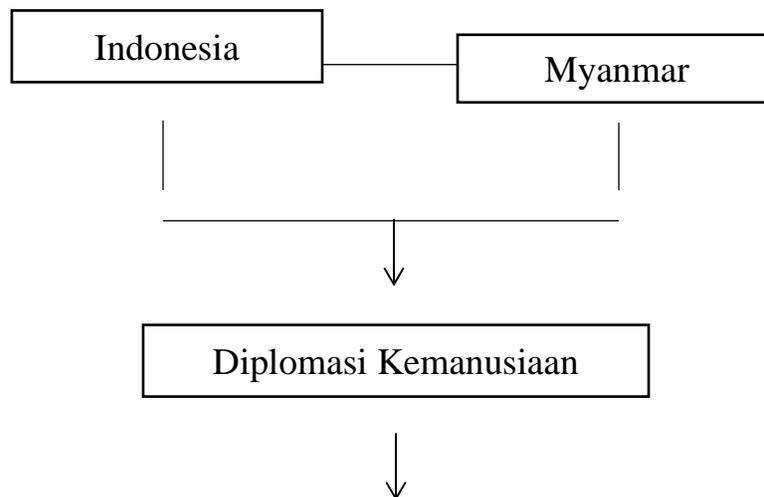
Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan, yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Dalam definisi tersebut, kerangka berpikir dibuat lebih identik untuk karya tulis ilmiah. Biasanya sudah mulai disusun sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, yang memuat semua variabel penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka berpikir kemudian bisa dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk susunan bagan yang saling terhubung, atau bagan alir (Abdhul, 2022).

Pada penelitian ini, kerangka berpikir dijelaskan dan digambarkan dalam bentuk susunan bagan yang saling terhubung bermulai dari fenomena Konflik Rohingya. Banyak faktor yang menjadi pemicu sehingga aksi dari fenomena Konflik Rohingya tersebut terus berlangsung di seluruh negeri yang berada di Kawasan Asia selatan hingga Asia Tenggara. Pemberontakan tersebut memberikan dampak diantaranya kekerasan meningkat dan terjadinya diskriminasi kepada satu etnis minoritas. Di tengah kekacauan ini, gelombang migrasi campuran ke Asia meningkat terkhusus melalui Indonesia, Malaysia, sehingga muncul gerakan migrasi massa pasca Konflik Rohingya.

Para imigran yang kemudian bermigrasi ke Indonesia, mempengaruhi kebijakan-kebijakan imigran yang telah ada di Asia, oleh karena itu di dalam penelitian ini dibahas pula bagaimana diplomasi kemanusiaan Indonesia dan Myanmar dalam membantu etnis rohingya. Berikut peta konsep dari kerangka pemikiran penelitian ini:

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**



Penyelesaian Konflik Etnis di  
Rohingya